

**PERANAN UNHCR DALAM USAHA MENANGGULANGI
TSUNAMI DI SRILANKA**

SKRIPSI

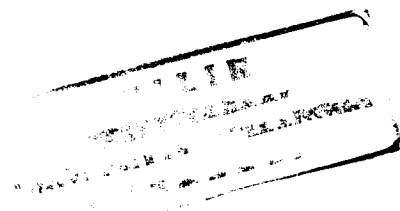
*Fis HI 40000
Har
0*



Oleh :

ERİYANTI MAYA LESTARI HARAHAP
NIM. 070116502

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007/2008**



BAB IV

KESIMPULAN

Dengan adanya tsunami, PBB menghadapi tantangan terbesar yang pernah dihadapinya. Waktu dan skala peristiwa bencana tersebut telah memicu berbagai aksi bantuan dari para aktor dan masyarakat kelas atas, serta pihak swasta dan pemerintah. Pemberian bantuan tersebut merupakan amanah atas kedermawanan masyarakat internasional, namun pada waktu yang bersamaan menempatkan aktor-aktor kemanusiaan pada sisi yang banyak disoroti karena publik dunia menaruh harapan tentang bagaimana para aktor tersebut menjalankannya dan bagaimana mereka mempertanggungjawabkan dana-dana yang telah dikeluarkan. Dengan keterlibatan PBB, khususnya UNHCR dalam upaya penanggulangan bencana tsunami di Srilanka, dapat dilihat bahwa mereka sudah sangat berupaya memberikan peranan maksimal, namun terlepas dari segala komitmen dan pengalaman yang telah dimiliki oleh UNHCR, tetap saja ada beberapa hal yang seharusnya lebih diperhatikan oleh UNHCR, dan hendaknya bisa diperbaiki di masa yang akan datang.

Adalah merupakan hal yang mutlak bahwa komunitas yang terkena bencana adalah yang paling paham akan kebutuhan mereka untuk mengatasi permasalahan yang timbul pasca bencana, namun dari penjelasan bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa UNHCR, tanpa mengesampingkan komitmen mereka, kurang melibatkan peranan dari komunitas-komunitas yang terkait langsung dan merasakan bencana tsunami, khususnya Srilanka. Oleh karena itu, adalah lebih baik apabila dalam misi-misi kemanusiaan UNHCR selanjutnya memberikan perhatian yang lebih dan turut mengajak bekerja sama institusi-institusi lokal yang ada, apakah itu lingkup pemerintahan atau

swasta, yang merepresentasikan dan bekerja dalam komunitas-komunitas yang terkait langsung dengan bencana. Apabila ingin melakukan pendekatan seperti ini dibutuhkan kepemimpinan, komitmen dan keberanian. Dengan adanya ketiga elemen penting ini maka diharapkan adanya peningkatan yang cukup signifikan terhadap keahlian para relawan dalam melakukan misi kemanusiaan, kesempurnaan perencanaan/ *planning* strategi pelaksanaan misi, meningkatkan hubungan dengan para pihak donor, serta meningkatkan persepsi akuntabilitas dan pertanggung jawaban terhadap pihak-pihak lain yang ikut membantu suatu misi kemanusiaan di bawah koordinasi UNHCR.

Khusus respons UNHCR terhadap bencana tsunami di Srilanka adalah berkaitan erat dengan kelanjutan proses perdamaian dengan pihak LTTE. Tsunami hendaknya jangan hanya semata-mata dipandang sebagai bencana alam; tetapi respons bantuan dan rekonstruksi juga harus mempertimbangkan konflik etnis dan proses perdamaian. Pemerintah Srilanka dan masyarakat internasional tidak boleh mengabaikan peranan LTTE dalam proses pasca-tsunami tetapi justru membina hubungan kemitraan. Respons yang efektif dan berkelanjutan terhadap bencana tsunami di Srilanka memerlukan suatu konsensus yang memisahkan serta mereformasi antara politik dan etnis untuk mewujudkan desentralisasi. Pemerintah Srilanka dan LTTE harus memanfaatkan momen pasca tsunami ini untuk memulai suatu proses perjanjian politik yang baru. Pencapaian kesepakatan resmi mengenai perjanjian kemanusiaan yang berkenaan dengan gencatan senjata, merupakan hal yang sangat penting dan vital.

Karena karakteristik bencana tsunami yang terjadi di Srilanka juga dilatar belakangi oleh adanya konflik di sana, maka tentu saja usaha- usaha bantuan kemanusiaan/ penanggulangan bencana yang dilakukan harus benar- benar spesifik dan dipikirkan terlebih

dahulu. Tidak semua niat baik untuk melaksanakan program bantuan kemanusiaan untuk menanggulangi bencana tsunami di sana dapat menghasilkan solusi yang berkesinambungan dan efektif.

Faktor- faktor yang berperan cukup dramatis dalam menentukan berhasilnya suatu program bantuan, bukan hanya jumlah dana/ barang dan bantuan lainnya yang diberikan, tapi ada hal lainnya seperti tingkatan kapasitas pemberian bantuan, tata cara pemberian/ suplai bantuan, cara program bantuan tersebut dirancang dan diimplementasikan, serta tingkat sensitivitas program bantuan tersebut terhadap situasi konflik di Srilanka.

Menurut sekelompok organisasi non pemerintah (NGO) yang berasal dari tiga benua yang berbeda yang bergerak untuk memerangi ketidakadilan dan kemiskinan yang tergabung dalam OXFAM (www.oxfam.org), ada beberapa rekomendasi yang dapat membantu program bantuan kemanusiaan yang berlatar belakang konflik pada kesempatan selanjutnya, antara lain adalah:

- **Perencanaan Manajemen Bencana.**

Semua indikasi yang terlihat di Srilanka menunjukkan diperlukannya peringatan awal dan kesiapan suatu daerah/ negara akan kemungkinan terjadinya bencana. Dapat dipastikan bahwa negara yang mempunyai kesiapan seperti ini, akan lebih baik bereaksi terhadap bencana yang terjadi

- **Pengumpulan dana.**

Dana yang terkumpul dari sumber- sumber swasta lebih besar dari yang dialokasikan oleh pemerintah. Hal ini di satu sisi dapat menimbulkan konflik karena

adanya ketakutan akan terjadinya politisasi terhadap dana tersebut oleh pihak tertentu. Hal ini dapat dieliminir apabila di masa yang akan datang pengumpulan dana dilakukan dengan lebih kreatif dan fleksibel, sehingga permasalahan yang ada dapat diatasi dengan cara yang komprehensif dan holistik.

- Pemberian bantuan secara bertahap dan bersyarat.

Untuk mendesak pemerintah Srilanka menggunakan dana yang diberikan secara berimbang antara usaha penanggulangan bencana dan meredakan konflik, maka komunitas internasional harus memberikan persyaratan tertentu dan juga waktu yang telah ditentukan pula. Apabila hal tersebut tidak tercapai maka ada konsekuensi yang harus diterima.

- Adanya adaptasi terhadap situasi dan kondisi domestik.

Berdasarkan riset dan observasi yang dilakukan oleh OXFAM, sangat direkomendasikan bahwa aktor-aktor internasional harus menyadari akan adanya kebutuhan untuk melakukan adaptasi terhadap konsep agar mendukung resolusi konflik dan perkembangan serta pemulihan pasca tsunami. Mereka harus beradaptasi dengan kultur lokal, bahasa dan karakter psikologis di tempat mereka akan bekerja.

- Dampak terhadap nilai-nilai lokal.

Harus diperhatikan bahwa pemberian bantuan secara langsung dan tanpa syarat apapun secara terus-menerus akan membawa dampak negatif terhadap komunitas lokal, karena mereka hanya akan bergantung pada orang lain dan tidak

mandiri. Pemberian bantuan dalam bentuk fisik secara langsung dan tanpa syarat boleh saja dilakukan, terutama dalam fase darurat, namun tidak boleh terus-menerus.

- Bersifat terbuka terhadap opini, masukan dan kritikan.

Hal ini penting untuk efektivitas dan efisiensi program tersebut. Karena program bantuan kemanusiaan ini akan berhasil apabila semua pihak yang ada merasa memiliki program ini dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya.

- Adanya rencana- rencana alternatif (*contingency plans*).

Hal ini diperlukan karena apabila rencana utama tidak dapat berjalan, ataupun bisa berjalan namun tidak optimal maka masih ada rencana- rencana yang bisa dipilih. Rencana alternatif ini dapat menghindari adanya situasi dan kondisi vakum/ kekosongan yang tidak boleh terjadi mengingat negara tersebut sedang dilanda bencana ditambah lagi adanya konflik.